



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI SWASTA TERHADAP
SANKSI PENUNGGAKAN PEMBAYARAN IURAN
BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Aqris Syaid, S.K.M., S.H.

2110622051

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI SWASTA TERHADAP
SANKSI PENUNGGAKAN PEMBAYARAN IURAN
BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aqris Syaid, S.K.M., S.H.
NRP : 2110622051
Tanggal : 25 Juli 2023

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Aqris Syaid, S.K.M., S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aqris Syaid, S.K.M., S.H.

NRP : 2110622051

Program Studi : Megister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesissaya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2023

Yang menyatakan,



(Aqris Syaid, S.K.M., S.H)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450
Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Aqris Syaid, S.K.M., S.H.
NRP : 2110622051
Program Studi : Megister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi
Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif
Kepastian Hukum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Megister Hukum pada Program Studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua Penguji

Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

Penguji Utama

**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH.,
MH. MTr. Adm. Kes.**

**Dr. Suberman, S.H., L.L.M.
Dekan Fakultas Hukum**

Pembimbing Tesis/ Penguji Kedua

Dr. dr. Abdul Kolib, M.H.

**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH.,
MH. MTr. Adm. Kes.
Koordinator Program Studi Magister Hukum**

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Kamis, 20 Juli 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah Rabbi ‘Alamin, segala puji Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Pengatur seluruh alam, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dengan baik dan tepat waktu dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum.**

Sholawat dan Salaam Penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Baginda Nabi Rasulallah Muhammad SAW, agar Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan mendapat safa’at Beliau kelak dari hari perhitungan nanti.

Penulisan tesis ini dilaksanakan sejak Maret 2023 yang dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum sebagaimana yang telah ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terima kasih yang tak terhingga, Penulis sampaikan secara khusus kepada yang dimulyakan Bapak Dr. dr. Abdul Kolib, M.H selaku dosen pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan saran, bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat serta semangat kepada Penulis sehingga Tesis ini berhasil diselesaikan.

Kemudian, terima kasih yang setulus-tulusnya juga Penulis sampaikan kepada almarhum/ almarhumah kedua Orang Tua Penulis yang begitu dicintai dan disayangi *allahummafirlahum warhamhum wa’afihim wa’fuanhum* Bapak H. Dr. Adek Junjuran Syaid, S.H, M.H, M.K.N selaku pimpinan AJS Law Firm yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan dan dukungannya kepada Penulis selama perkuliahan, istri dan seluruh keluarga besar Penulis yang menjadi pendukung dan motivator untuk menyelesaikan pendidikan dan pembuatan tesis pada Program Studi Megister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, izinkan juga Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu, dalam hal semangat, saran, bimbingan, arahan dan informasi yang sangat bermanfaat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini, kepada :

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. Suherman, SH., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Handar Subhandi, SH, MH,_MTr. Adm. Kes., selaku Koordinator Program Studi Program Megister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H., selaku dosen dan ketua penguji pada penulisan penelitian tesis;
5. Dr. Handar Subhandi, SH, MH,_MTr. Adm. Kes., selaku dosen dan penguji pada penulisan penelitian tesis;
6. Dr. dr. Abdul Kolib, M.H., selaku dosen, pembimbing dan penguji pada penulisan penelitian tesis;
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
8. Seluruh sahabat seperjuangan yaitu mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, angkatan tahun 2021 yang telah memberikan semangat sehingga tesis ini berhasil diselesaikan oleh Penulis..

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan Bapak/ Ibu dan Sahabat semua dalam membantu proses penyelesaian pembuatan Tesis ini, aamiin yaa mujibasaailiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta sangat jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga Penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan juga kepada pihak-pihak lainnya yang membutuhkan.

Wabillahit Taufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 25 Juli 2023

Aqris Syaid, S.K.M., S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Tujuan Penelitian	8
I.4. Manfaat Penelitian	9
I.5. Kerangka Konseptual	10
I.5.1. Kerangka Teoritis	10
I.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum	10
I.5.1.2. Teori Jenjang Norma Hukum/ Hierarki Perundang-undangan	13
I.5.1.3. Teori Kepastian Hukum	17
I.5.2. Kerangka Konseptual	20
I.5.2.1. Jaminan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional	20
I.5.2.2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan)	21
I.5.2.3. Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan	21
I.5.2.4. Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan	21
I.5.2.5. Manfaat Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan	22
I.5.2.6. Pemberi Kerja	22
I.5.2.7. Peserta Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan	22
I.5.2.8. Pekerja Penerima Upah (PPU).....	23
I.5.2.9. Pegawai Swasta	23
I.5.2.10. Iuran Peserta Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan	23

I.5.2.11. Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan Oleh Pemerintah Daerah	23
I.5.2.12. Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Nasional Kesehatan BPJS Kesehatan	23
I.5.2.13. Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan Pegawai Swasta	24
I.5.2.14. Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan	24
I.5.2.15. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan	25
I.6. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 28

II.1. Kesehatan dan Jaminan Sosial Sebagai Hak Konstitusional	29
II.2. Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia.....	32
II.2.1. BPJS Kesehatan : Tujuan, Program, Fungsi, Tugas Pokok, Kewenangan, Hak dan Kewajiban	35
II.2.2. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan : Pengertian, Kategori dan Jenis Kepesertaan, Kewajiban dan Hak	40
II.2.3. Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan: Pengertian, Besaran, Mekanisme Pembayaran	43
II.3. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terkait Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	46
II.4. Kewajiban dan Hak Pegawai Swasta Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	47
II.5. Teori Perlindungan Hukum	48
II.6. Teori Jenjang Norma Hukum/ Hierarki Perundang-undangan	49
II.7. Teori Kepastian Hukum.....	49

BAB III METODE PENELITIAN 51

III.1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Penelitian Hukum	51
III.1.1. Pengertian Penelitian Hukum	51
III.1.2. Tujuan Penelitian Hukum.....	54
III.1.3. Fungsi Penelitian Hukum	54
III.2. Penelitian Hukum : Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum, Data/ Bahan Penelitian Hukum dan Jenis Metode Penelitian Hukum	56
III.2.1. Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum.....	56
III.2.2. Data/ Bahan Penelitian Hukum : Jenis Data/ Bahan Hukum, Metode Analisis Data/ Bahan Hukum, Pengumpulan,	

Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum.....	59
III.2.2.1. Jenis Data/ Bahan Hukum.....	60
III.2.2.2. Metode Analisis Data/ Bahan Hukum	62
III.2.2.3. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian dan Penarikan Kesimpulan Data/ Bahan Hukum.....	64
III.2.3. Jenis Metode Penelitian Hukum.....	74
III.2.3.1. Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal	75
III.2.3.1.1. Objek dan Fokus Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal.....	77
III.2.3.1.2. Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal.....	78
III.2.3.1.3. Fungsi dan Manfaat Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal.....	79
III.2.3.1.4. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal	80
III.2.3.2. Penelitian Hukum Empiris.....	82
III.2.3.2.1. Objek dan Fokus Penelitian Hukum Empiris	83
III.2.3.2.2. Type Penelitian Hukum Empiris	83
III.2.3.2.3. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris....	84
III.3. Penggunaan Penelitian Hukum Pada Penulisan Tesis :	
Metode Penelitian Hukum, Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum, Jenis Data/ Bahan Hukum, Metode Analisis Data/ Bahan Hukum dan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum.	86
III.3.1. Metode Penelitian Hukum.....	86
III.3.2. Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum.....	87
III.3.3. Jenis Dan Metode Analisis Data/ Bahan Hukum	88
III.3.4. Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum	90
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	97
IV.1. Defisit Dana Jaminan Sosial dan Kolektabilitas Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan	97
IV.2. Antisipasi Defisit Dana Jaminan Sosial dan Penunggakan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	102
IV.2.1. Perubahan atau Penyesuaian/ Kenaikan Besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	103
IV.2.2. Pemberlakuan Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	107
IV.3. Ketentuan dan Mekanisme Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Bagi Pegawai Swasta	110

IV.3.1	Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	112
IV.5.	Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Ditinjau Dalam Perspektif Kepastian Hukum	113
IV.5.1.	Tinjauan Norma Atau Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan	114
IV.5.2.	Pertentangan Hukum Dalam Norma Atau Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan	117
IV.5.3.	Perbedaan Dalam Penerapan Hukum Norma Atau Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	123
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		128
V.1.	Simpulan	128
V.2.	Saran	129
DAFTAR PUSTAKA		131
RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	43
Tabel 2	Besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).....	44
Tabel 3	Besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU).	45
Tabel 4	Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan oleh Pemberi Kerja.....	101
Tabel 5	Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah	102
Tabel 6	Perubahan Besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	104
Tabel 7	Perubahan Besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	105
Tabel 8	Perubahan Besaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU)	105
Tabel 9	Perubahan Besaran Gaji atau Upah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU).....	106

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Lampiran 2 Surat Permohonan Informasi dan Data Ke BPJS Kesehatan
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Informasi dan Data Ke BPJS Kesehatan
- Lampiran 4 Surat No. 1316/I.2/0123 BPJS Kesehatan Tentang Jawaban Permohonan Informasi dan Data Ke BPJS Kesehatan